

# PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 2014

## OUTLINE ANALISIS PROVINSI

1. Perkembangan Indikator Utama
  - 1.1 Pertumbuhan Ekonomi
  - 1.2 Pengurangan Pengangguran
  - 1.3 Pengurangan Kemiskinan
2. Kinerja Pembangunan Kota/Kabupaten
  - 2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan kemiskinan
  - 2.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM
  - 2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran
  - 2.4 Kesenjangan Wilayah
3. Penyebab Permasalahan Pembangunan
  - 3.1 Tingginya Ketergantungan terhadap Sektor Primer (Pertanian)
  - 3.2 Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
  - 3.3 Rendahnya Kualitas lapangan Kerja
  - 3.4 Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah
  - 3.5 Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
  - 3.6 Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat
  - 3.7 Rendahnya Kualitas Belanja Daerah
4. Prospek Pembangunan Tahun 2015
5. Penutup
  - 5.1 Isu Strategis Daerah
  - 5.2 Rekomendasi Kebijakan



Desember 2014

*SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH*



# Perkembangan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara 2014

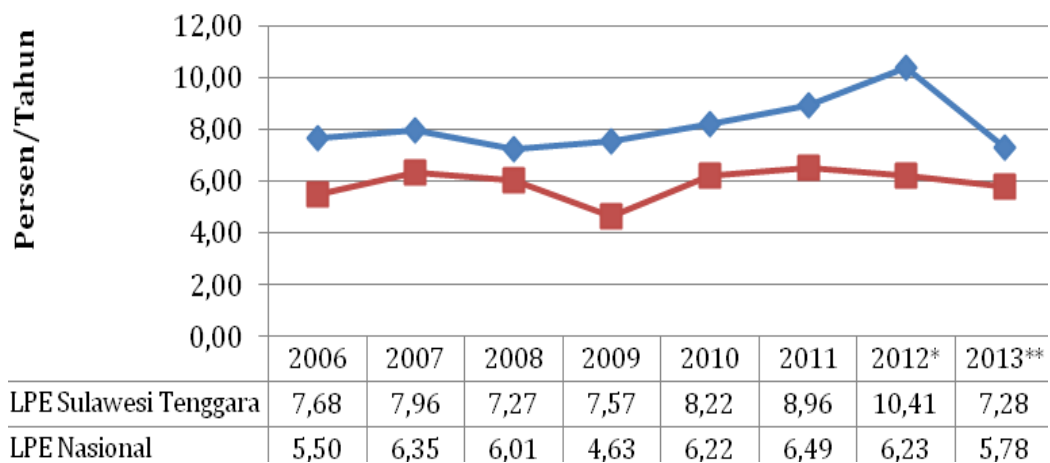
## SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

### A. Perkembangan Indikator Utama

#### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Provinsi Sulawesi Tenggara berperan strategis secara nasional sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta pertambangan nikel khususnya sebagai simpul pengolahan nikel, perkebunan kakao, dan perikanan. Kinerja perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2006-2013 cukup baik, terlihat pada meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu tersebut (Gambar 1). Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara sebesar 8,17 persen per tahun, lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,90 persen per tahun. Kontribusi Wilayah Sulawesi Tenggara terhadap pembentukan PDRB Pulau Sulawesi adalah sebesar 11,47 persen, sementara itu kontribusi terhadap pembentukan PDB Nasional sebesar 0,15 persen. Kontribusi sektor ekonomi ini diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi lokal Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga kegiatan perekonomian penduduk menjadi lebih signifikan untuk perekonomian di wilayah tersebut.

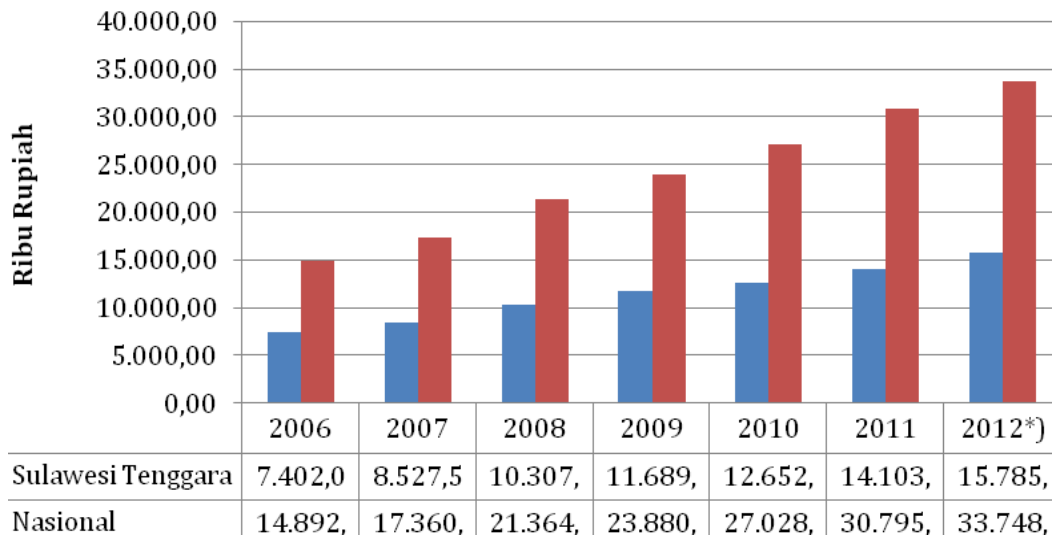
**Gambar 1**  
**Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2000**



Sumber: BPS, 2013

Kinerja pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dari besarnya PDRB per kapita di Sulawesi Tenggara selama kurun waktu 2006-2012 cenderung meningkat walaupun masih berada di bawah angka nasional. Hal ini menunjukkan kesejahteraan di Provinsi Sulawesi Tenggara juga meningkat meskipun relatif tidak baik secara nasional. Jika pada tahun 2006 rasio antara PDRB perkapita Sulawesi tenggara dan PDB nasional sebesar 49,70 persen, maka pada tahun 2012 rasionya mengecil menjadi 46,77 (Gambar 2).

**Gambar 2**  
**PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku**

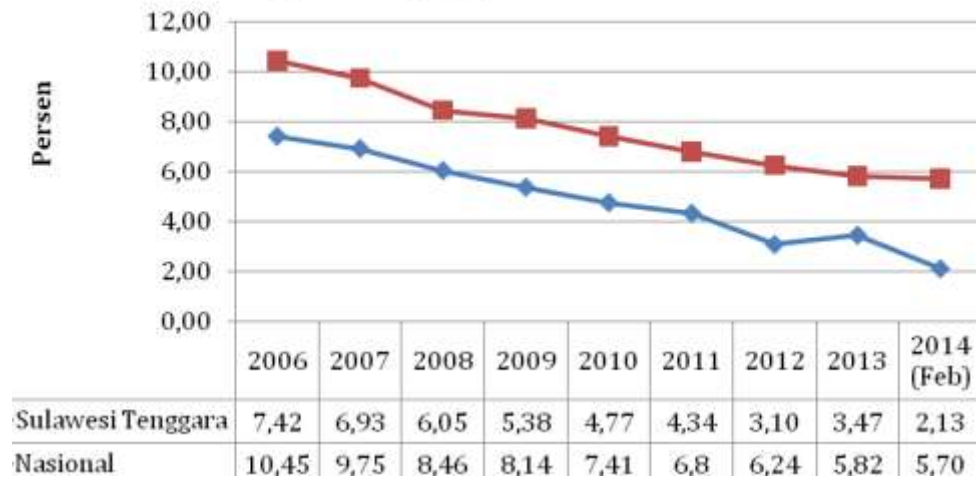


Sumber: BPS, 2013

## 2. Pengurangan Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sulawesi Tenggara selama 2006-2013 berkurang sebesar 3,95 persen. Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran wilayah cenderung menurun. TPT Sulawesi Tenggara pada periode 2006-2012 termasuk rendah bila dibandingkan dengan TPT nasional (Gambar 3). Tingkat pengangguran yang rendah di tengah pendapatan per kapita yang rendah mengindikasikan rendahnya produktivitas pekerja di daerah tersebut.

**Gambar 3**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka**

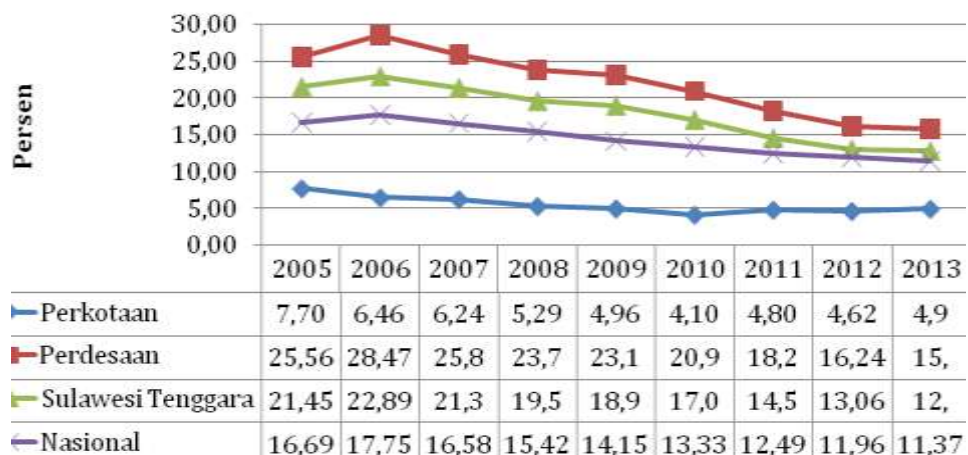


Sumber: BPS, 2014

### 3. Pengurangan Kemiskinan

Tingginya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan dampak positif terhadap penurunan kemiskinan di wilayah ini. Selama kurun waktu 2005-2013 persentase penduduk miskin cenderung menurun, terutama di perdesaan (Gambar 4). Secara nasional persentase penduduk miskin di Sulawesi Tenggara tergolong tinggi. Pada tahun 2013 persentase penduduk miskin di nasional sudah mencapai 11,37 persen, namun tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara masih sebesar 12,80 persen dan 15,80 di perdesaan. Faktor penyebab kemiskinan di perdesaan adalah karena keterbatasan pengetahuan dan modal usaha, pekerjaan yang kurang potensial, dan pola kehidupan masyarakat yang konsumtif. Sementara itu ketergantungan terhadap hasil alam juga menjadi faktor eksternal penyebab kemiskinan di suatu wilayah.

**Gambar 4**  
**Persentase Penduduk Miskin**



Sumber: BPS, 2013

## B. Kinerja Pembangunan Kabupaten/ Kota

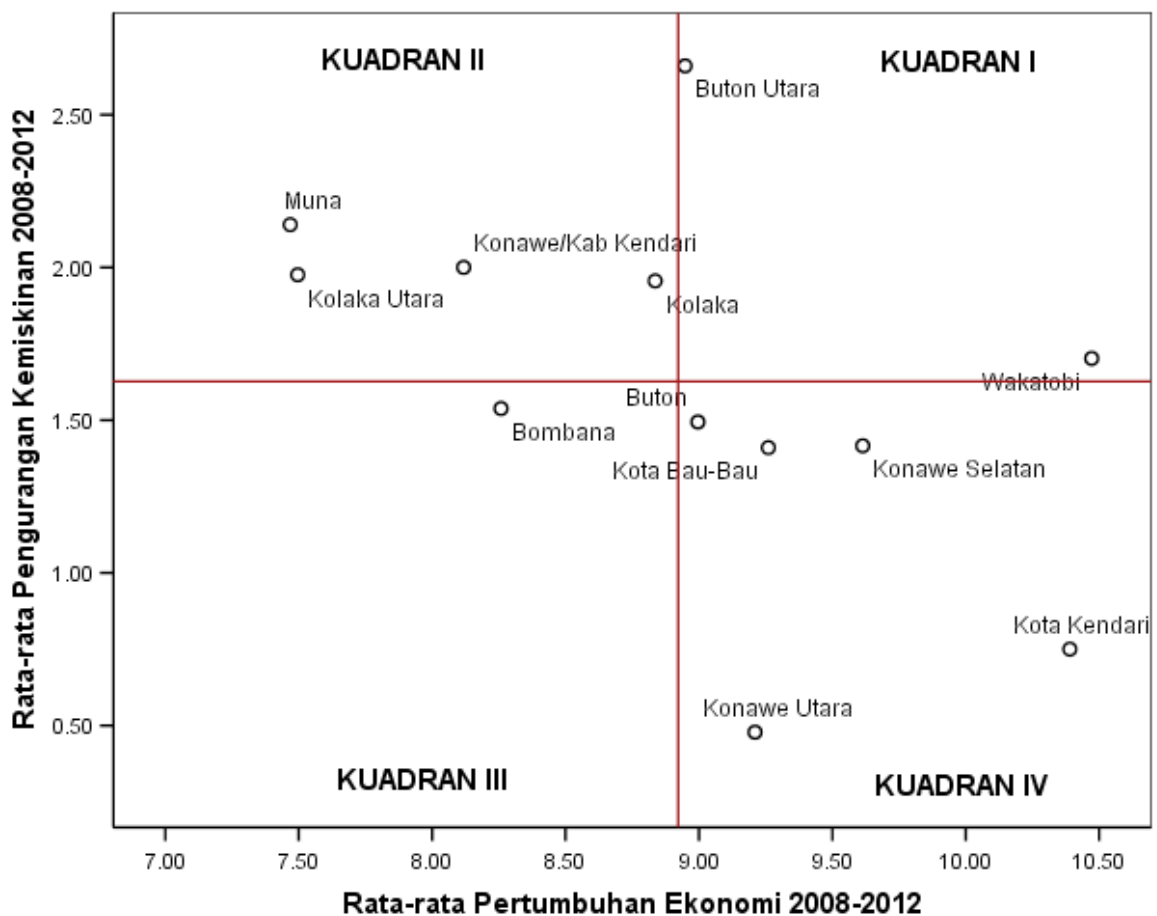
Kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) , serta perluasan lapangan kerja.

### 1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Gambar 5 menunjukkan persebaran kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, dengan penjelasan sebagai berikut.

*Pertama*, Kabupaten Buton Utara dan Wakatobi merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di daerah ini dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (pro-growth, pro-poor). Tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan.

**Gambar 5**  
**Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin**  
**Tahun 2008-2012**



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

*Kedua*, Kabupaten Muna, Kolaka Utara, Kolaka, dan Konawe/Kab. Kendari terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di atas rata-rata (*low growth, pro-poor*). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa.

*Ketiga*, Kabupaten Bombana terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-poor*). Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan.

*Keempat*, Kabupaten Kota Bau-bau, Buton, Konawe Utara, Konawe Selatan dan Kota Kendari terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro poor*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penurunan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Tantangan lainnya adalah meningkatkan koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

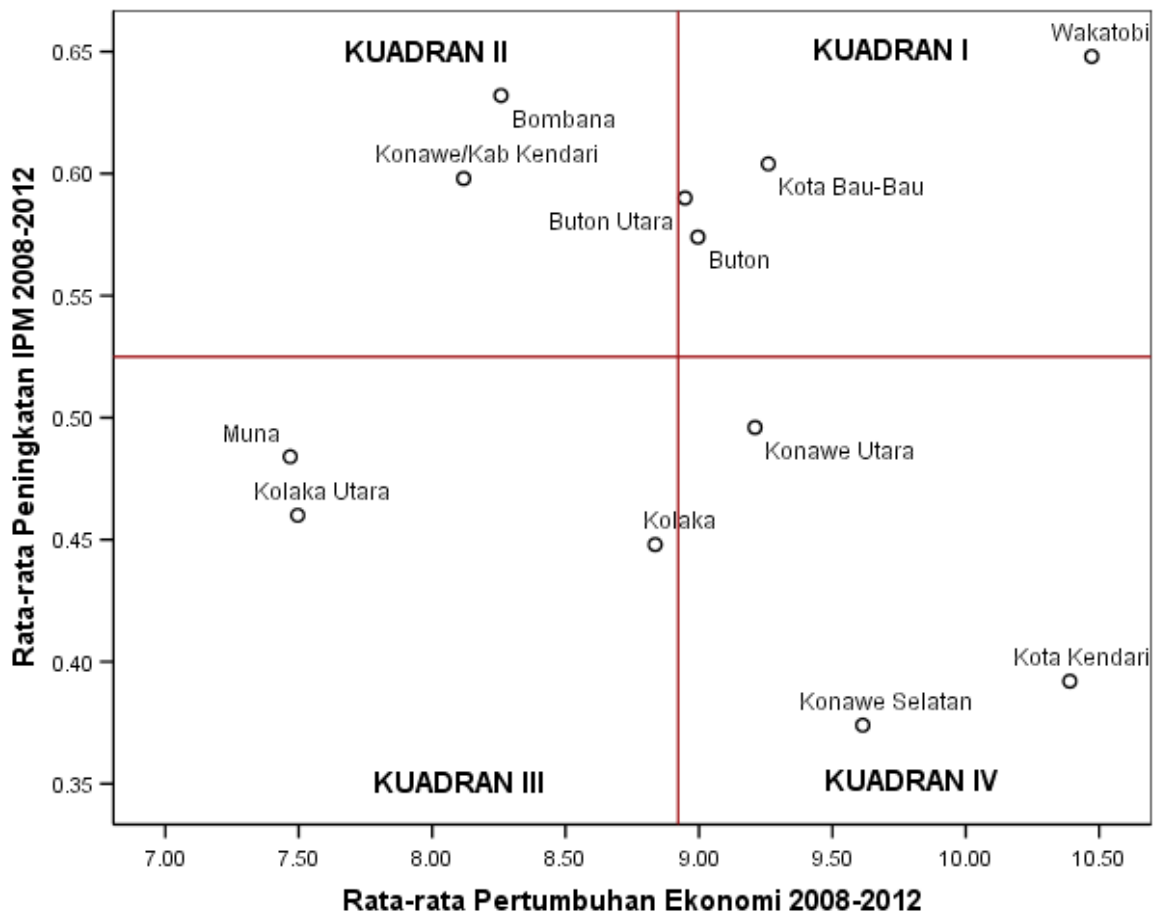
## **2. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM**

Gambar 6 menunjukkan distribusi kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2012. *Pertama*, Kabupaten Wakatobi, Buton, Buton Utara dan Kota Bau-bau terletak di kuadran I, merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (*pro-growth, pro-human development*). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

*Kedua*, Kabupaten Bombana dan Konawe/Kab. Kendari yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (*low growth, pro-human development*). Ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas

dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

**Gambar 6**  
**Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan IPM Tahun 2008-2012**



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

*Ketiga*, Kabupaten Muna, Kolaka Utara dan Kolaka terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-human development*). Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.

*Keempat*, Kabupaten Konawe Selatan, Konawe Utara, dan Kota Kendari terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro human development*). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.



### 3. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran

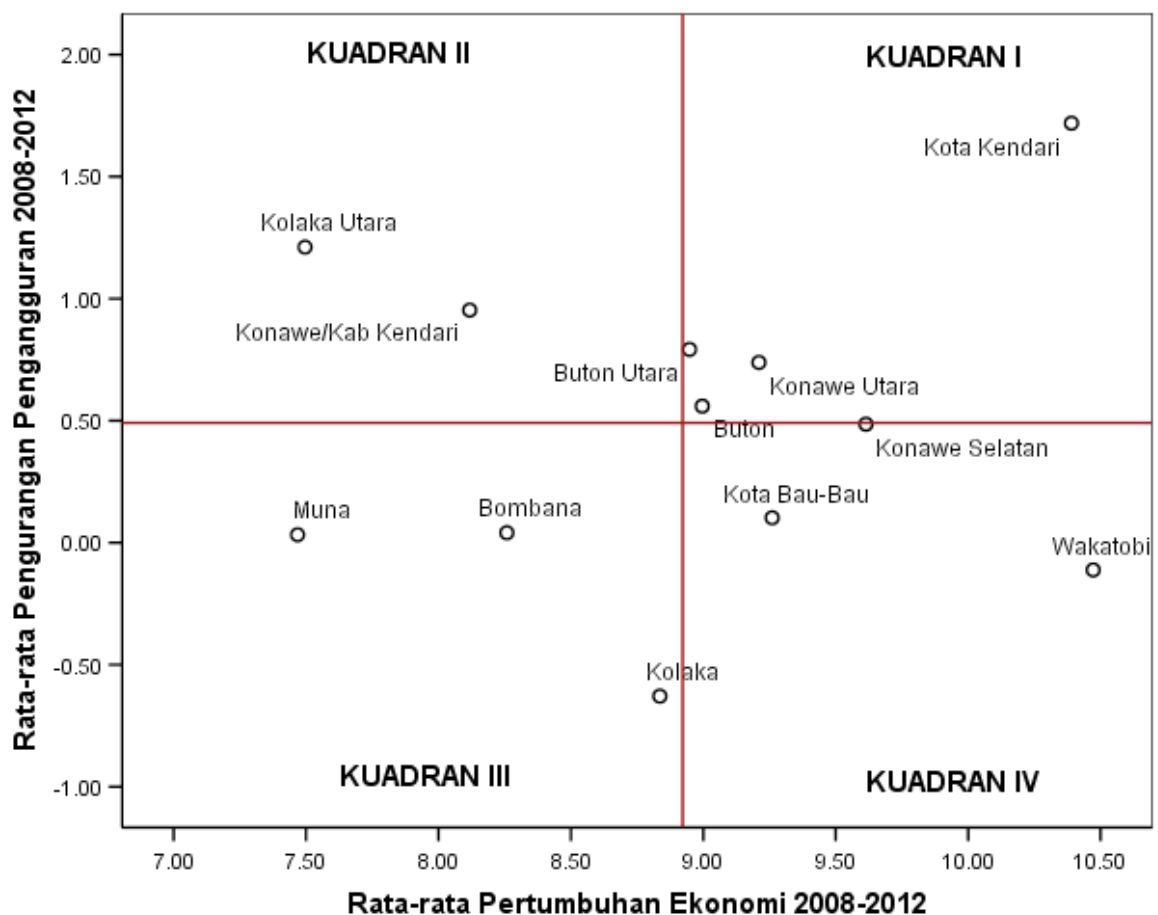
Gambar 7 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 2008-2012.

*Pertama*, Kabupaten Buton, Buton Utara, Konawe Utara, dan Kota Kendari terletak di kuadran I, merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (*pro-growth, pro-job*). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

*Kedua*, Kabupaten Kolaka Utara dan Konawe/Kab Kendari yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di atas rata-rata (*low growth, pro-job*). Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan perikanan.

**Gambar 7**

#### Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Rata-Rata Pengurangan Jumlah Pengangguran Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

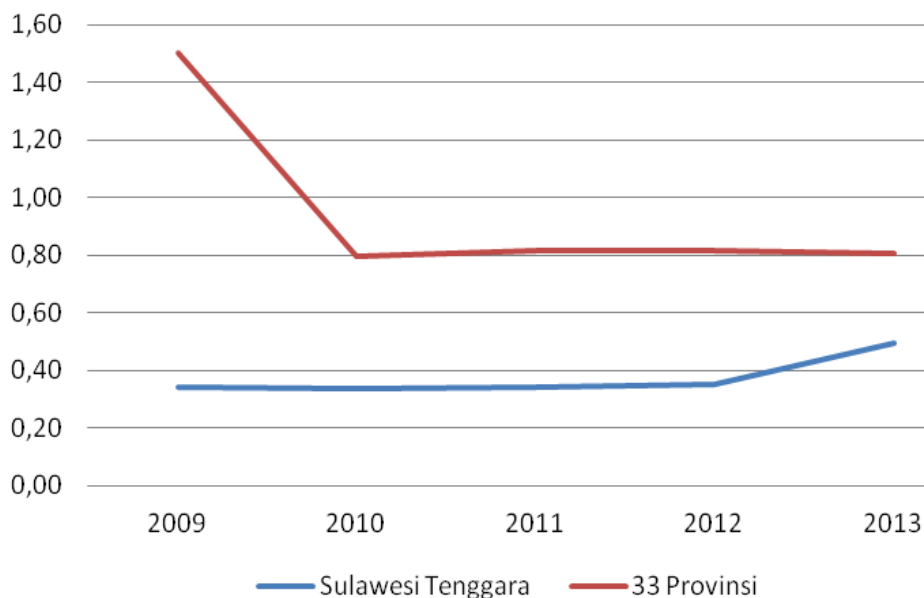
*Ketiga*, Kabupaten Muna, Bombana, dan Kolaka terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-job*). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar.

*Keempat*, Kabupaten Wakatobi, Konawe Selatan, dan Kota Bau-Bau terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro job*). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran. Daerah tersebut termasuk daerah perkebunan, dan daerah perkotaan yang harus menampung migrasi penduduk dari daerah perdesaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan. Tantangan lainnya adalah mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal.

#### 4. Kesenjangan Ekonomi

Kesenjangan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara berfluktuatif namun selalu berada di bawah nasional. Kesenjangan ekonomi wilayah Sulawesi Tenggara termasuk dalam kesenjangan sedang namun apabila dilihat dari trend perkembangan tingkat kesenjangan wilayah 2009-2013, provinsi ini memiliki kecenderungan meningkat. Keberadaan sumber daya alam dan jenis kegiatan perekonomian menjadi salah satu penyebab kesenjangan ekonomi wilayah.

**Gambar 8**  
**Perkembangan Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson) 2009-2013**



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara cukup tinggi, walaupun distribusi pendapatannya kurang merata di seluruh kabupaten/ kota di provinsi ini, terlihat dari besarnya gap antara kabupaten atau kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah (Tabel 1). Kabupaten Buton Utara memiliki nilai PDRB per kapita tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Perekonomian di Buton Utara banyak dipengaruhi oleh kegiatan berskala besar yang memiliki pengaruh langsung terhadap perekonomian masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat karena menyerap banyak tenaga kerja. Pendapatan perkapita Kabupaten Wakatobi tergolong rendah walaupun menunjukkan kecenderungan perkembangan yang meningkat, menunjukkan aktivitas ekonomi di kabupaten ini mengalami peningkatan produktivitas.

**Tabel 1**  
**Perkembangan Nilai PDRB Perkapita ADHB dengan Migas Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara 2007-2012 (000/jiwa)**

<b>Kab/Kota</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Buton	4.689	5.801	6.796	7.513	8.634	9.908
Muna	6.486	7.958	9.122	9.701	10.652	1.701
Kendari	6.858	8.348	9.728	10.421	11.395	12.660
Kolaka	14.820	17.008	17.563	19.600	22.589	6.117
Konawe Selatan	6.029	7.534	8.962	9.905	10.962	2.235
Bombana	5.437	6.700	7.483	8.032	8.847	9.805
Wakatobi	4.983	6.137	7.608	8.646	9.833	1.119
Kolaka Utara	11.194	12.970	14.474	15.469	17.247	19.376
Konawe Utara	10.047	12.234	14.231	15.433	17.174	9.024
Buton Utara	12.713	15.519	18.207	19.850	22.005	24.205
Kota Kendari	10.849	13.360	15.387	16.644	18.614	20.381
Kota Bau-bau	9.778	11.880	13.985	15.138	16.747	18.479
<b>SULAWESI TENGGARA</b>	<b>8.528</b>	<b>10.335</b>	<b>11.689</b>	<b>12.653</b>	<b>14.103</b>	<b>5.786</b>

Sumber: BPS, 2013

## **C. Penyebab Permasalahan Pembangunan**

### **1. Tingginya Ketergantungan terhadap Sektor Pertanian**

Sulawesi Tenggara merupakan provinsi yang memiliki kekayaan sumber daya alam mineral, namun struktur perekonomiannya masih didominasi oleh sektor pertanian. Sektor pertambangan belum memberikan kontribusi besar pada perekonomian wilayah ini (Tabel 2). Sektor pertanian di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan setiap tahunnya namun laju pertumbuhannya rendah karena penurunan angka pertumbuhan riil pada sub sektor pertanian (perkebunan, peternakan, tanaman pangan, perikanan/ kelautan). Dalam hal ini perlu peningkatan produksi, produktivitas, serta pemasaran produk pertanian seperti kakao, padi, sapi, dan rumput laut. Sementara itu peranan sektor-sektor yang mendukung industrialisasi masih rendah. Sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 6,91 persen dalam PDRB provinsi, sedangkan sektor utilitas sebagai pendukung industrialisasi besarnya kurang dari 1 persen.

**Tabel 2**  
**Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha (2013)**

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Pertanian	31,87	33,10
2.	Pertambangan	6,07	5,12
3.	Industri Pengolahan	6,91	8,01
4.	Listrik, Gas, Air Minum	0,92	0,74
5.	Konstruksi	8,54	8,53
6.	Perdagangan, Hotel, Restoran	18,57	16,79
7.	Angkutan, Telekomunikasi	9,19	8,77
8.	Keuangan	5,94	5,74
9.	Jasa-jasa	12,00	13,20
		100,00	100,00

*Sumber: BPS, 2013*

Berdasarkan analisis sektor basis terlihat kuatnya sektor pertanian dalam perekonomian. Sektor basis perekonomian di Sulawesi Tenggara antara lain pertanian, konstruksi, dan jasa-jasa (Tabel 3). Subsektor pertanian yang memiliki nilai LQ lebih besar dari satu antara lain tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Hal ini menunjukkan Sulawesi Tenggara memiliki *proportional share* lebih besar dari rata-rata daerah lain untuk sektor tersebut. Sebaliknya semua sektor di kelompok industri pengolahan dan keuangan memiliki nilai LQ kurang dari satu.

**Tabel 3**  
**Nilai LQ Sektor Perekonomian Sulawesi Tenggara 2008-2012**

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
<b>1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan</b>	2,54	2,44	2,35	2,28	2,19
a. Tanaman Bahan Makanan	0,98	0,89	0,88	0,90	0,89
b. Tanaman Perkebunan	5,50	5,06	4,62	4,22	4,04
c. Peternakan	2,95	3,02	2,95	2,91	2,81
d. Kehutanan	1,42	1,45	1,44	1,47	1,48
e. Perikanan	4,54	4,66	4,52	4,27	3,86
<b>2. Pertambangan dan Penggalian</b>	0,63	0,62	0,72	0,93	1,27
a. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Pertambangan Bukan Migas	1,28	1,12	1,30	1,74	2,44
c. Penggalian	1,73	1,90	2,01	2,25	2,33
<b>3. Industri Pengolahan</b>	0,33	0,31	0,34	0,33	0,31
a. Industri Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1). Pengilangan Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Gas Alam Cair (LNG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Industri Bukan Migas	0,36	0,33	0,37	0,36	0,33

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
<b>4. Listrik, Gas &amp; Air Bersih</b>	0,97	0,94	0,97	1,00	1,09
a. Listrik	1,39	1,45	1,47	1,48	1,59
b. Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Air Bersih	0,50	0,56	0,52	0,49	0,54
<b>5. Konstruksi</b>	1,30	1,33	1,40	1,46	1,47
<b>6. Perdagangan, Hotel &amp; Restoran</b>	0,90	0,99	1,00	1,00	0,99
a. Perdagangan Besar dan Eceran	1,06	1,18	1,18	1,17	1,15
b. Hotel	0,06	0,05	0,06	0,07	0,07
c. Restoran	0,16	0,18	0,18	0,20	0,20
<b>7. Pengangkutan dan Komunikasi</b>	0,99	0,99	0,94	0,91	0,87
a. Pengangkutan	1,85	1,98	1,98	1,99	1,98
1). Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Angkutan Jalan Raya	3,24	3,32	3,33	3,35	3,27
3). Angkutan Laut	0,52	0,57	0,58	0,59	0,57
4). Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	0,32	0,37	0,40	0,38	0,34
5). Angkutan Udara	1,48	1,89	1,87	1,87	1,94
6). Jasa Penunjang Angkutan	0,50	0,54	0,52	0,52	0,54
b. Komunikasi	0,28	0,30	0,27	0,24	0,22
<b>8. Keuangan, Real Estate &amp; Jasa Perusahaan</b>	0,60	0,60	0,63	0,68	0,68
a. Bank	0,66	0,69	0,79	0,92	0,93
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	0,57	0,52	0,53	0,53	0,53
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Real Estat	0,75	0,72	0,69	0,69	0,66
e. Jasa Perusahaan	0,27	0,26	0,25	0,26	0,25
<b>9. Jasa-jasa</b>	1,41	1,40	1,31	1,24	1,22
a. Pemerintahan Umum	2,93	2,92	2,77	2,63	2,65
b. Swasta	0,23	0,24	0,24	0,24	0,25
1). Jasa Sosial Kemasyarakatan	0,11	0,12	0,11	0,11	0,10
2). Jasa Hiburan dan Rekreasi	0,02	0,02	0,04	0,04	0,03
3). Jasa Perorangan dan Rumah tangga	0,29	0,32	0,30	0,31	0,32

Nilai LQ dihitung menggunakan PDRB ADHK Tahun 2000

Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Indikator di atas menekankan pentingnya pengembangan sektor industri pengolahan di Sulawesi Tenggara. Hal ini dikarenakan sektor pertanian primer memiliki elastisitas permintaan yang rendah terhadap pendapatan, yang ditunjukkan dengan relatif bertahannya kinerja pertumbuhan sektor pertanian di masa krisis. Ketika situasi ekonomi membaik dan pendapatan masyarakat meningkat, permintaan terhadap komoditas pertanian tidak meningkat dengan proporsi yang sama. Berbeda halnya dengan permintaan terhadap produk manufaktur, yang sangat elastis terhadap peningkatan pendapatan. Sektor industri pengolahan sangat potensial dalam menciptakan nilai tambah, mendorong perkembangan sektor-sektor lain (*multiplier effect*), dan menciptakan

lapangan kerja. Selama periode 2011-2014 sektor industri pengolahan dan jasa-jasa mampu menciptakan lapangan kerja secara signifikan meskipun memberikan kontribusi kecil pada perekonomian (Tabel 4). Ke depan, sektor industri pengolahan masih perlu berkembang lagi sehingga mampu menyerap angkatan kerja baru dan menyerap tenaga kerja yang menumpuk di sektor pertanian yang kurang produktif.

**Tabel 4**  
**Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan**  
**Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011-2014**

No.	Lapangan Pekerjaan	2010	2014 (Feb)	Perubahan
1	Pertanian	527.066	465.940	(61.126)
2	Pertambangan	22.006	20.191	(1.815)
3	Industri Pengolahan	51.163	77.367	26.204
4	Listrik, Gas, Air	1.329	804	(525)
5	Bangunan	32.385	52.426	20.041
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	153.502	209.910	56.408
7	Angkutan & Telekomunikasi	48.921	46.114	(2.807)
8	Keuangan	5.895	23.806	17.911
9	Jasa-Jasa	142.004	215.457	73.453
	<b>Total</b>	<b>984.271</b>	<b>1.112.015</b>	<b>127.744</b>

Sumber: BPS, 2014

## 2. Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Dari sisi pengeluaran (penggunaan) pendorong utama pertumbuhan ekonomi selama 2006-2013 adalah konsumsi rumah tangga. PDRB Sulawesi Tenggara didominasi oleh konsumsi rumah tangga (Tabel 5). Kontribusi investasi (PMTB) sebagai sektor yang penting untuk pertumbuhan daerah sebesar 33,84 persen, mengindikasikan peran dunia usaha dan kewirausahaan untuk inovasi dan efisiensi mulai tumbuh.

**Tabel 5**  
**PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013**

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Konsumsi Rumah Tangga	52,49	53,12
2.	Konsumsi Lembaga Nirlaba	0,36	0,26
3.	Konsumsi Pemerintah	21,70	21,31
4.	PMTB	33,84	27,64
5.	Perubahan Stok	1,98	1,33
6.	Ekspor	26,27	25,94
7.	Impor	36,63	29,61
	<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS, 2013

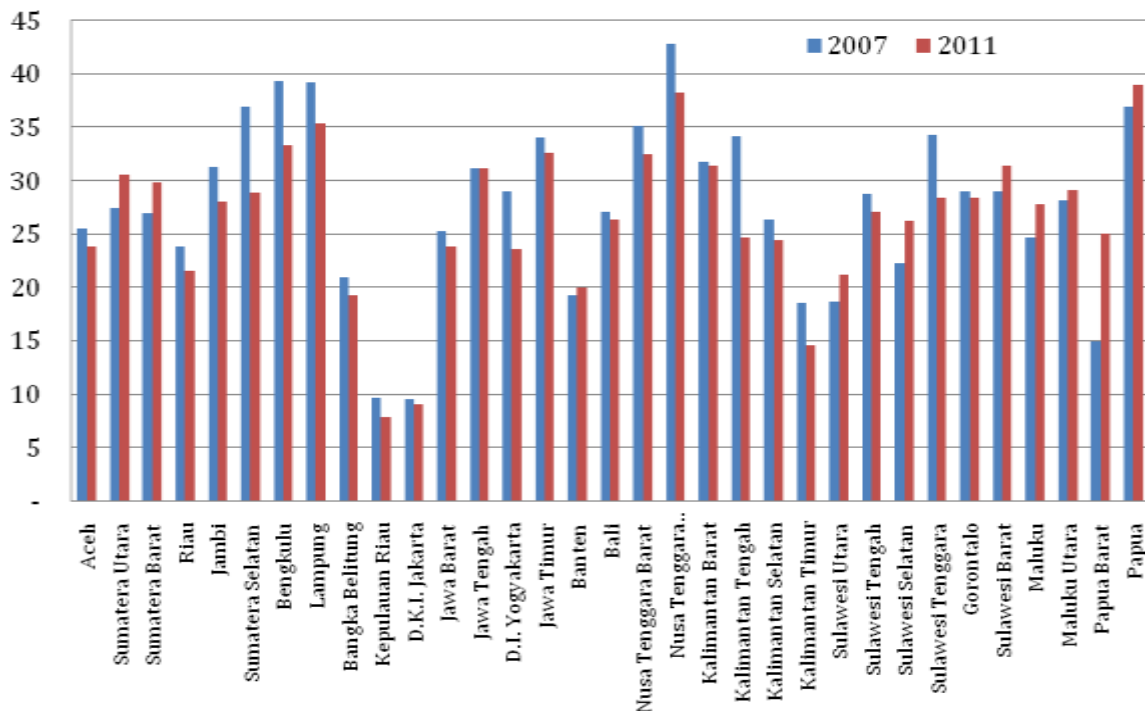
Investasi berperan meningkatkan stok kapital di daerah yang digunakan untuk memproduksi. Tingkat investasi yang rendah akan diikuti oleh terbatasnya kemampuan daerah untuk memacu peningkatan produksi. Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu diperhatikan adalah kelembagaan yang

ramah dunia usaha. Salah satu indikatornya adalah kemudahan pelayanan perijinan, peningkatan sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana investasi yang memadai.

### 3. Rendahnya Kualitas Lapangan Kerja

Kualitas lapangan kerja ditunjukkan dari banyaknya pekerja yang bekerja di sektor informal. Mereka ini terhitung bekerja namun menghadapi ketidakpastian yang tinggi sehingga sangat rentan terhadap sedikit saja guncangan ekonomi yang terjadi. Porsi pekerjaan kurang berkualitas di Sulawesi Tenggara meningkat dari tahun 2007 ke 2011 dan termasuk tinggi secara nasional (Gambar 9). Pada tahun 2011 persentase pekerjaan kurang berkualitas di Sulawesi Tenggara mencapai 27 persen. Kebijakan pembangunan sektor pertanian harus sejalan dengan kebijakan pembangunan di sektor industri karena rendahnya produktivitas pertanian. Pengembangan industri dapat diarahkan pada industri berbasis pertanian dalam arti luas, seperti agroindustri yang didukung oleh agrobisnis.

**Gambar 9**  
**Persentase Pekerjaan Kurang Berkualitas**



Sumber: BPS, 2012

Upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas lapangan kerja adalah dengan memperluas kesempatan kerja formal, memperlancar perpindahan pekerja dari pekerjaan yang produktivitasnya rendah ke pekerjaan yang produktivitasnya tinggi, dan mempertahankan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja yang masih berada di sektor informal dan mempersempit kesenjangan upah pada tingkat produktivitas yang sama. Agar pembangunan ketenagakerjaan di Sulawesi Tenggara dapat terwujud diperlukan strategi yang bisa menciptakan iklim kondusif dalam rangka perluasan dan penciptaan kesempatan kerja yang produktif dan berkualitas.

#### 4. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas daerah. Pembangunan ekonomi membutuhkan dukungan sarana transportasi dan ketersediaan jaringan listrik yang memadai. Sulawesi Tenggara sangat bergantung pada jaringan jalan yang menghubungkan Sulawesi Tenggara dengan provinsi lainnya di Pulau Sulawesi. Secara keseluruhan wilayah Sulawesi Tenggara dilayani oleh jaringan jalan sepanjang 11.690 km. Tingkat kepadatan jalan di Sulawesi Selatan lebih tinggi daripada nasional dan relatif lebih baik dibandingkan provinsi lain (Tabel 6).

Tingkat defisiensi infrastruktur wilayah dapat dianalisis dengan membandingkan wilayah dengan tingkat pendapatan per kapita setara. Hal ini didasarkan asumsi terdapat korelasi antara tingkat kepadatan jalan dan tingkat pendapatan perkapita dalam suatu perekonomian. Dengan menggunakan data 33 provinsi terlihat hubungan positif antara PDRB per kapita dan tingkat kepadatan jalan (Gambar 10). Semakin tinggi pendapatan per kapita wilayah kepadatan jalannya cenderung tinggi pula. Provinsi-provinsi yang posisinya di bawah kurva linier tersebut berarti mengalami defisiensi infrastruktur jalan. Dengan menggunakan ukuran ini terlihat bahwa kepadatan jalan di Sulawesi Tenggara relatif lebih baik dibandingkan provinsi lain. Dengan demikian panjang jalan bukanlah masalah utama bagi Sulawesi Tenggara.

**Tabel 6**  
**Kepadatan Jalan dan PDRB Per Kapita Provinsi Tahun 2012**

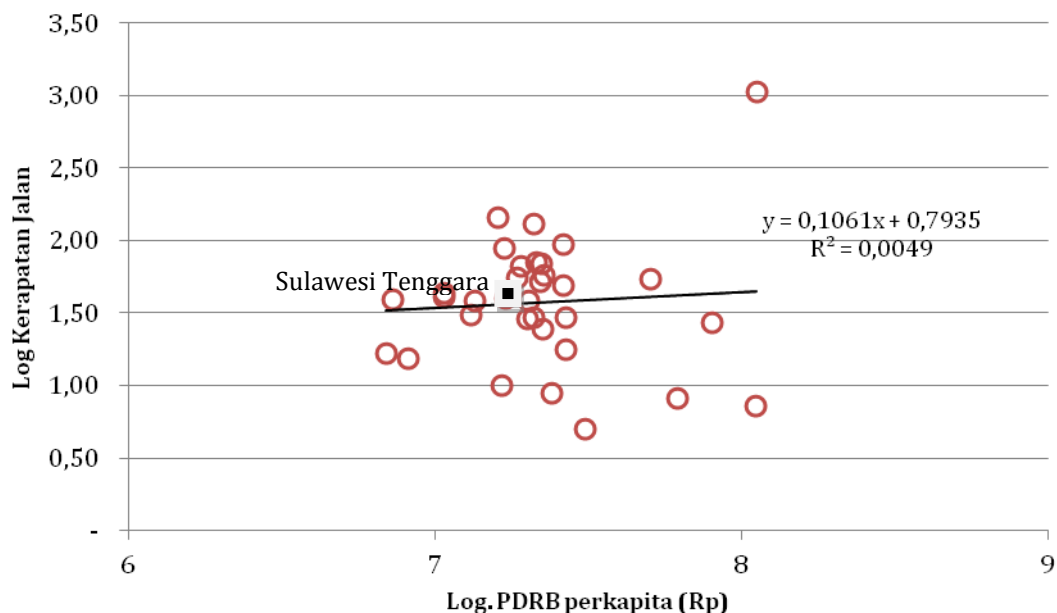
No	Provinsi	PDRB per kapita (Ribu Rp)	Kepadatan Jalan
1	DKI Jakarta	111.913	1.068,36
2	DIY	16.054	146,56
3	Bali	20.948	130,28
4	Jawa Timur	26.274	95,37
5	Jawa Tengah	16.864	88,75
6	Jawa Barat	21.274	72,08
7	Sulawesi Selatan	22.151	69,68
8	Banten	19.038	66,81
9	Sulawesi Utara	22.624	57,89
10	Lampung	18.460	56,44
11	Kep. Riau	50.174	54,95
12	Sumatera Barat	22.035	52,36
13	Sumatera Utara	26.185	49,50
14	NTB	10.691	43,55
15	Gorontalo	10.703	40,85
16	Sulawesi Barat	17.012	40,62
17	NTT	7.236	39,95
18	Bengkulu	13.522	38,99
19	Aceh	20.164	38,76
<b>20</b>	<b>Sulawesi Tenggara</b>	<b>13.112</b>	<b>30,71</b>
21	Kep. Bangka Belitung	26.784	29,93
22	Sulawesi Tengah	21.052	29,73
23	Kalimantan Selatan	20.051	29,28
24	Riau	79.786	27,25
25	Jambi	22.508	24,81



No	Provinsi	PDRB per kapita (Ribu Rp)	Kerapatan Jalan
26	Sumatera Selatan	26.742	17,86
27	Maluku Utara	6.929	16,72
28	Maluku	8.134	15,39
19	Kalimantan Barat	16.421	10,00
30	Kalimantan Tengah	23.987	8,96
31	Papua Barat	61.462	8,24
32	Kalimantan Timur	111.210	7,22
33	Papua	30.713	5,06
<b>Indonesia</b>		<b>33.531</b>	<b>25,99</b>

Sumber: BPS (2012), Statistik Kementerian PU (2013)

**Gambar 10**  
**Hubungan antara Kerapatan Jalan dan GDP Per Kapita Tahun 2012**



Sumber: BPS (2013), Statistik Kementerian PU (2013)-diolah

Secara kualitas, kondisi jalan di Sulawesi Tenggara relatif baik, ditunjukkan dari panjang jalan yang sudah beraspal di provinsi ini. Permukaan jalan beraspal di Sulawesi Tenggara sudah mencapai 81 persen (Tabel 7), menunjukkan daya dukung jalan untuk pergerakan barang relatif baik

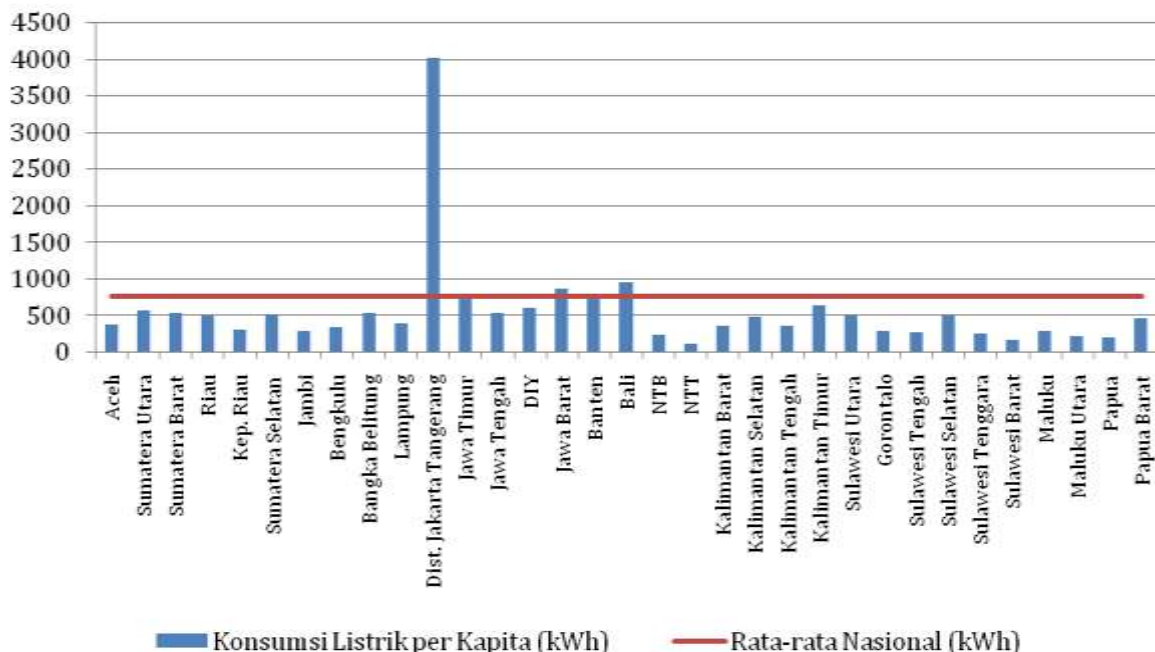
**Tabel 7**  
**Panjang Jalan Nasional Menurut Jenis Permukaan Tahun 2012**

PROVINSI	JENIS PERMUKAAN JALAN								Total	
	Aspal		Kerikil		Tanah		Lainnya			
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Sulawesi Tenggara	966	81	1129	11	90	8	2	0	2037	100
Sulawesi	5.103	81	678	11	469	8	24	0	6.274	100
INDONESIA	42.284	79	5018	9	3504	7	2836	5	53.642	100

Sumber: BPS, 2012

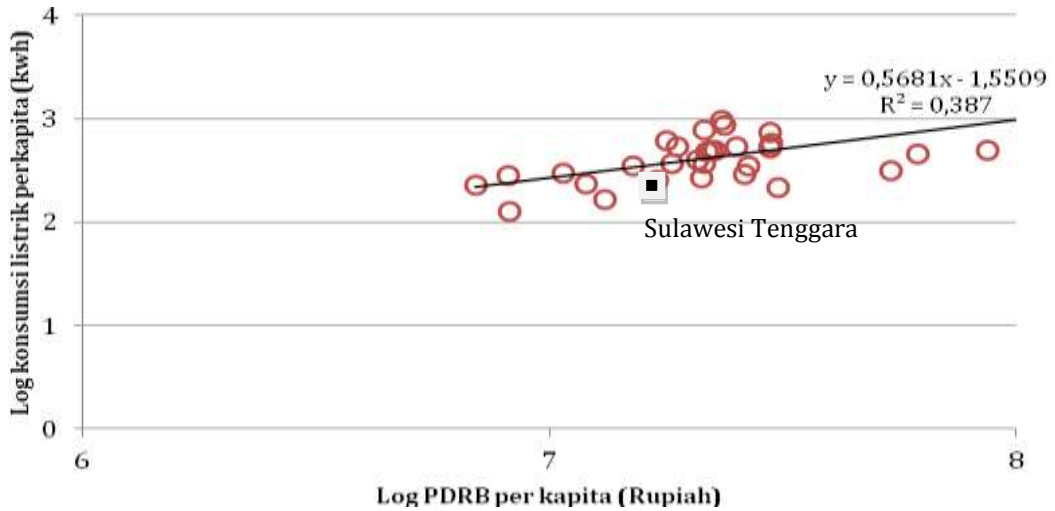
Infrastruktur lain yang mendorong produktivitas daerah adalah jaringan listrik. Konsumsi listrik di Sulawesi Tenggara termasuk rendah dan kurang dari rata-rata tingkat konsumsi listrik nasional sebesar 753,7 kWh (Gambar 11). Untuk mengukur defisiensi terhadap infrastruktur kelistrikan digunakan cara yang sama, yaitu dengan melihat korelasi antara pendapatan perkapita dan konsumsi listrik perkapita. Dengan menggunakan data 33 provinsi, terlihat hubungan yang positif antara PDRB per kapita dengan tingkat konsumsi listrik (Gambar 12). Wilayah yang memiliki posisi di bawah kurva linier mengalami defisiensi infrastruktur listrik. Sulawesi Tenggara termasuk wilayah yang mengalami defisiensi infrastruktur listrik karena posisinya di bawah kurva linier. Hal ini menunjukkan konsumsi listrik Sulawesi Tenggara jauh lebih rendah dari provinsi lain dengan tingkat pendapatan perkapita sama. Dengan demikian, ketersediaan jaringan listrik merupakan salah satu masalah di Sulawesi Tenggara. Untuk mewujudkan industrialisasi di wilayah ini pembangunan infrastruktur kelistrikan perlu mendapatkan perhatian khusus.

**Gambar 11**  
**Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2013**



Sumber: Statistik PLN, 2013

**Gambar 12**  
**Hubungan Konsumsi Listrik dan Pendapatan Tahun 2013**

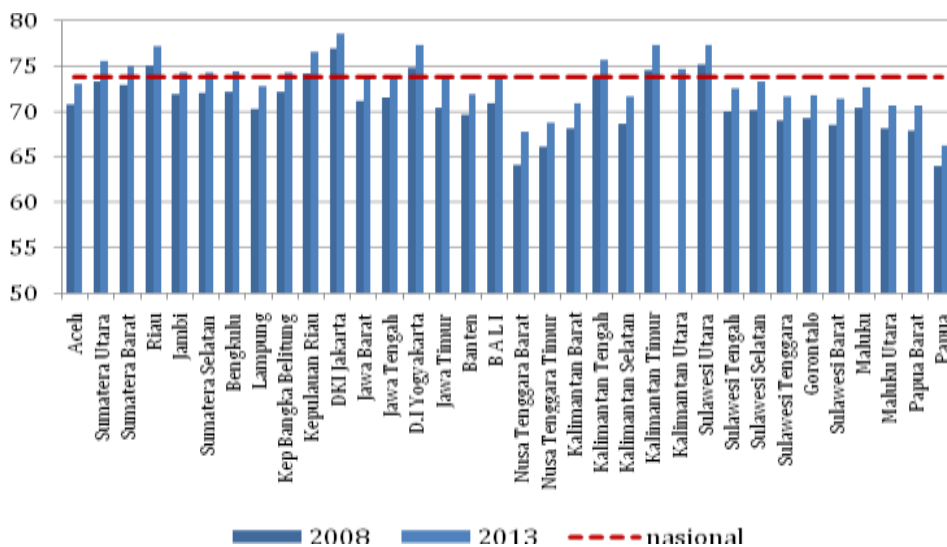


Sumber: BPS (2013), Statistik PLN (2013) - diolah

### 5. Rendahnya Kualitas Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Tenggara yang ditunjukkan melalui nilai IPM relatif meningkat tahun 2013 dibandingkan tahun 2008 walaupun masih di bawah IPM nasional sebesar 73,81 (Gambar 13).

**Gambar 13**  
**Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2008 dan 2013**



Sumber: BPS, 2013

IPM Sulawesi Tenggara belum baik capaiannya karena berada pada peringkat 27 secara nasional dengan nilai IPM sebesar 71,73 pada tahun 2013. Pada indikator usia harapan hidup, terjadi perbaikan dari 67,40 tahun pada tahun 2008 menjadi 68,56 tahun pada tahun 2013. Rata-rata lama sekolah di Sulawesi Tenggara meningkat dari 7,74 tahun pada 2008 menjadi 8,44 tahun pada 2013. Sementara itu pada indikator angka melek huruf, capaian di Sulawesi Tenggara pada tahun 2008 dan 2013 meningkat dari 91,42 menjadi 92,59 persen, lebih rendah dari capaian nasional 94,14 persen.

Apabila dilihat dari struktur angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, proporsi angkatan kerja dengan ijazah minimal SMA meningkat dari 32,53 persen pada tahun 2008 menjadi 41,35 persen pada tahun 2014 (Tabel 8). Hal ini menunjukkan perbaikan kualitas angkatan kerja yang menjadi modal berharga untuk mendukung industrialisasi berbasis pertanian.

**Tabel 8**  
**Angkatan Kerja Sulawesi Tenggara Menurut Pendidikan yang Ditamatkan**

No.	Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	2008	2014 (Feb)	Perubahan
1	≤ SD	529.701	477.651	(52.050)
2	SMTp	210.198	188.706	(21.492)
3	SMTA Umum	256.147	312.855	56.708
5	Diploma I/II/III/Akademi	44.478	38.654	(5.824)
6	Universitas	56.048	118.319	62.271
<b>Total</b>		<b>1.096.572</b>	<b>1.136.185</b>	<b>39.613</b>

Sumber: BPS, 2014

## 6. Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat

Salah satu sumber pendanaan investasi dan usaha ekonomi masyarakat adalah tabungan masyarakat. Melalui fungsi intermediasi perbankan, tabungan masyarakat akan berkembang apabila dikonversi menjadi investasi di sektor-sektor produktif. Imbal hasil dari investasi ini sebagian akan dikonsumsi dan sebagian akan ditabung oleh masyarakat. Demikian seterusnya sehingga terjadi perputaran dan pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 9**  
**Rasio Simpanan dan Pinjaman di Bank Umum dan BPR Tahun 2013**

Wilayah	Posisi Simpanan di Bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Posisi Pinjaman di bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan
Sulawesi Tenggara	10.804	16.101	1,49
Sulawesi	104.086	153.356	1,47
Nasional	3.575.891	3.322.683	0,92

Sumber: BPS, 2014

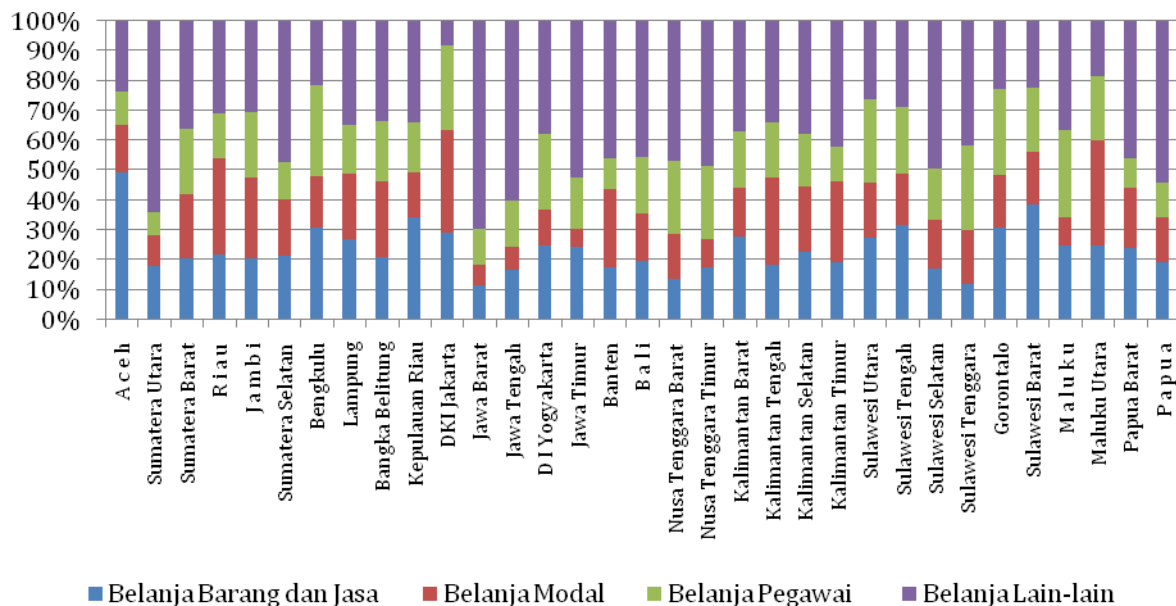
Rasio pinjaman terhadap simpanan di Sulawesi Tenggara nilainya lebih besar dari satu dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan terbatasnya potensi simpanan masyarakat di Sulawesi Tenggara, atau terdapat keterbatasan tabungan sebagai sumber modal masyarakat. Sebagai perbandingan, rasio pinjaman terhadap simpanan tahun 2013 untuk wilayah Sulawesi adalah 1,49 dan rasio untuk nasional adalah 0,92 (Tabel 9).

## 7. Rendahnya Kualitas Belanja Daerah

Provinsi Sulawesi Tenggara perlu meningkatkan kualitas komposisi anggarannya. Serapan belanja modal menunjukkan kinerja yang cukup rendah. Porsi belanja modal dalam total APBD Tahun 2013 Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 18,21 persen (Gambar 14). Sementara itu, komposisi dari belanja barang dan jasa sebesar 11,89 persen, belanja pegawai sebesar 28,32 persen, dan belanja lain-lain sebesar 41,59 persen.

Belanja modal memiliki dampak langsung terhadap perekonomian sehingga perbaikan komposisi belanja pemerintah daerah ini perlu lebih diarahkan pada belanja modal (komponen investasi). Investasi pemerintah memiliki peran penting dalam perekonomian karena merupakan perintis dan pembuka jalan bagi masuknya investasi swasta.

**Gambar 14**  
**Komposisi Belanja Pemerintah Daerah 2013**



Sumber: BPS, 2013

## D. Prospek Pembangunan Tahun 2015

Prospek pertumbuhan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2015 ditentukan oleh seberapa besar realisasi investasi di daerah. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi membutuhkan investasi yang besar, baik investasi pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha. Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki potensi sumber daya alam untuk dikembangkan, seperti pada sektor pertanian, kehutanan, pertambangan dan bahan galian,

industri, dan pariwisata. Sumber daya perikanan dan hasil laut Provinsi Sulawesi Tenggara dinilai memiliki potensi yang besar untuk memenuhi permintaan pasar domestik dan internasional. Industri berbasis sumber daya alam dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) memiliki potensi untuk dikembangkan di Sulawesi Tenggara.

Kehidupan sosial ekonomi di Sulawesi Tenggara terus berkembang, yang diikuti oleh membaiknya pelayanan publik, meningkatnya belanja pemerintah daerah, dan meningkatnya pembangunan infrastruktur. Tingkat kesenjangan konsumsi masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara (indeks gini) selama periode 2008-2013 mengalami peninglatan dari angka 0,33 menjadi 0,43, lebih rendah dari angka nasional yang sebesar 0,35 pada tahun 2008 menjadi 0,4 pada tahun 2013. Kesenjangan output antarkabupaten/kota di Sulawesi Tenggara tergolong rendah secara nasional, yang menciptakan suasana kondusif bagi penurunan kemiskinan, peningkatan kerukunan sosial, dan penciptaan stabilitas politik dan keamanan.

Berdasarkan potensi sumber daya alamnya, pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai simpul perikanan dan perkebunan kakao. Pemerintah perlu meningkatkan daya saing produk domestik terhadap komoditi yang akan diperdagangkan, salah satunya melalui perbaikan infrastruktur. Selain proyek-proyek infrastruktur utama yang secara langsung melewati Sulawesi Tenggara, proyek-proyek infrastruktur utama di kota-kota pusat pertumbuhan lainnya juga diperkirakan akan hanya memberi manfaat besar pada Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan modal pembangunan yang dimiliki dan semakin meningkatnya kinerja pembangunan, prospek pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 dalam mendukung pencapaian target RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 7,8 – 10,3 persen dapat tercapai. Di Kawasan Timur Indonesia, kinerja ekonomi semakin membaik dengan dukungan meningkatnya produksi pertanian dan aktivitas pertambangan setelah diberlakukannya ijin ekspor mineral bagi para penambang besar. Pertumbuhan ekonomi Kawasan Timur Indonesia telah meningkat pada akhir 2014 melebihi perkiraan sebelumnya. Kenaikan pertumbuhan ini berkat dukungan kinerja ekonomi Sulawesi Tenggara dan beberapa wilayah Sulawesi lainnya
2. Sasaran pengurangan tingkat kemiskinan dalam Buku III RPJMN 2015-2019 adalah 13,5 – 9,3 persen, sedangkan pada tahun 2013 tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 12,83 persen, untuk itu diperlukan upaya konsisten untuk menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi ini. Selama kurun waktu 2014-2019 Sulawesi Tenggara harus menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 3,53 poin persentase atau 0,59 poin persentase per tahun.
3. Prospek pencapaian sasaran-sasaran utama pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara akan sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan baik internal daerah Sulawesi Tenggara maupun lingkungan eksternal. Dampak krisis di Eropa dan pelambatan arus perdagangan global merupakan ancaman eksternal yang bisa mengganggu kinerja perekonomian daerah.

## **E. Penutup**

### **1. Isu Strategis Daerah**

Dari hasil analisis dan informasi yang tersedia, dan memperhatikan kriteria isu strategis: (i) berdampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional; (ii) merupakan akar permasalahan pembangunan di daerah; dan (iii) mengakibatkan dampak buruk berantai pada pencapaian sasaran pembangunan yang lain jika tidak segera diperbaiki, maka isu-isu strategis Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan infrastruktur dan produktivitas sektor pertanian
- b. Industrialisasi yang didukung dan pengembangan lapangan kerja berkualitas
- c. Peningkatan investasi di daerah
- d. Pengembangan transportasi darat, laut, udara melalui peningkatan infrastruktur pendukung
- e. Peningkatan kapasitas kelistrikan terutama untuk mendukung industrialisasi
- f. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- g. Mobilisasi tabungan masyarakat dan fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong akses permodalan usaha
- h. Peningkatan kualitas belanja modal pemerintah daerah

### **2. Rekomendasi Kebijakan**

Penanganan isu-isu strategis daerah diperkirakan akan dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan yang perlu ditempuh dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna;
- b. Pemberdayaan petani dan nelayan khususnya dalam pernaikan akses faktor produksi (benih, pupuk, pestisida) termasuk peningkatan jaringan irigasi, penyuluhan dan promosi citra komoditas keunggulan daerah.
- c. Peningkatan kemudahan perijinan usaha;
- d. Perbaikan kualitas jaringan jalan dan peningkatan suplai listrik;
- e. Pemerataan akses pendidikan terutama pendidikan menengah dan kejuruan;
- f. Peningkatan kualitas belanja modal APBD yang diprioritaskan pada sektor infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah;
- g. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah, penjaminan kredit dan pengendalian inflasi daerah.

